



Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Marina Paramitha Sari Piola

Universitas Ichsan Gorontalo

marinaparamitha@gmail.com

Abstract

This study aims to measure the financial performance of the Regional Government of North Bolaang Mongondow Regency by using the measurement of the Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, and Independence Ratio. The type of research carried out is in the form of qualitative descriptive. And the data used in this study is secondary data in the form of the 2017-2020 North Bolaang Mongondow Regional Government Budget Realization Report which was obtained using documentation techniques. The data measurement method uses the financial ratio formula. The results of this study indicate that regional independence is in the instructive criteria. The independence of the Regional Government of the North Bolaang Mongondow Regency is in a very low financial capacity in meeting the funding needs for the implementation of government tasks, development and community social services. The results of the 2017-2020 efficiency ratio analysis can be concluded, that the efficiency level of the local government's financial management of North Bolaang Mongondow Regency ranges from 4.30%-1.51% so that the government's performance is in the very efficient category. The results of the analysis of the effectiveness of regional financial management in 2017-2020 show that the level of effectiveness of financial management carried out by the Regional Government of North Bolaang Mongondow Regency ranges from 9.5% to 114%. This achievement figure indicates that the government's performance can be categorized as very good.

Keywords : *Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Independence Ratio*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan menggunakan pengukuran Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah berbentuk deskriptif kualitatif. Dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara 2017-2020 yang diperoleh menggunakan Teknik dokumentasi. Metode pengukuran data menggunakan rumus rasio keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Hasil analisis rasio efisiensi tahun 2017-2020 dapat disimpulkan, bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkisar antara 4,30%-1,51% sehingga kinerja pemerintah berada pada kategori sangat efisien. Hasil analisis rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2017-2020 nampak bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkisar antara 9,5% sampai 114%. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dapat dikategorikan sangat baik.

Kata kunci: Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Kemandirian.

PENDAHULUAN

Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efektif dan efisien, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Suatu negara tentunya sangat memerlukan suatu sistem pemerintahan yang baik. Sistem yang baik di butuhkan sebagai alat untuk melaksanakan berbagai layanan publik di berbagai daerah dan selaku perlengkapan untuk warga setempat buat berfungsi aktif dalam menentukan arah serta pengembangan taraf hidupnya sendiri cocok dengan kesempatan serta tantangan yang hendak dialami dengan menghubungkan kehidupan nasional. Ekonomi pembangunan di fokuskan pada kenaikan ekonomi nasional buat mewujudkan demokrasi ekonomi. Identitas demokrasi ekonomi diisyarati dengan perekonomian wilayah yang tumbuh secara bertepatan dan balance, didukung dengan adanya potensi dan peran serta daerah yang optimal.

Dalam rangka penerapan otonomi wilayah serta desentralisasi fiskal, pemerintah wilayah dituntut untuk mempunyai kemandirian keuangan wilayah yang lebih besar. Dengan tingkatan kemandirian keuangan yang lebih besar berarti wilayah tidak lagi bergantung pada dorongan dari pemerintah pusat serta provinsi lewat dana perimbangan. Tetapi tidak berarti bila kemandirian keuangan wilayah besar, hingga wilayah telah tidak butuh lagi memperoleh dana perimbangan. Dana perimbangan masih senantiasa dibutuhkan buat memesatkan pembangunan di wilayah, hingga wilayah telah tidak butuh lagi memperoleh dana perimbangan. Dana perimbangan masih senantiasa dibutuhkan buat memesatkan pembangunan di wilayah.

Halim (2007: 167) menarangkan kalau karakteristik utama sesuatu wilayah yang sanggup melakukan otonomi, ialah(1) keahlian keuangan wilayah, maksudnya wilayah wajib mempunyai kewenangan serta keahlian buat menggali sumber- sumber keuangan, mengelola serta memakai keuangan sendiri yang lumayan mencukupi buat membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, serta(2) ketergantungan kepada dorongan pusat wajib seminimal bisa jadi, supaya Pemasukan Asli Wilayah(PAD) bisa jadi bagian sumber keuangan terbanyak sehingga peranan pemerintah wilayah jadi lebih besar. Tetapi pada realitasnya, telah 2 belas tahun semenjak otonomi wilayah diberlakukan, dikala ini keahlian keuangan sebagian pemerintah wilayah masih sangat bergantung pada penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat.

Pengukuran kinerja buat kepentingan publik bisa dijadikan penilaian serta memulihkan kinerja dengan pembandingan skema kerja serta penerapannya. Tidak hanya itu bisa pula digunakan selaku tolak ukur buat kenaikan kinerja pemerintah wilayah di periode selanjutnya. Pengukuran kinerja bisa memakai analisis rasio keuangan wilayah pada laporan perhitungan anggaran pemasukan serta belanja wilayah yang terdiri dari rasio kemandirian keuangan wilayah, rasio daya guna serta efisiensi pemasukan asli wilayah, rasio kegiatan, *debt service coverage ratio* serta rasio perkembangan (Halim,2007:150). Jadi analisis kinerja keuangan ini sangat berarti sebab bisa dijadikan pedoman buat revisi kinerja pada waktu yang hendak tiba. menampilkan arah pencapaian sasaran kinerja yang sudah diresmikan memonitor serta mengevaluasi kinerja, menolong menungkapkan serta membongkar permasalahan yang terdapat. Terselenggaranya *Good Governance* ialah salah satu persyaratan untuk pemerintah dalam menggapai tujuan dan cita- cita berbangsa serta bernegara.

Pengelolaan keuangan wilayah tidak cuma membutuhkan sumber energi manusia yang profesional namun pula butuh terdapatnya sokongan dari keahlian keuangan yang mencukupi.

Keahlian pemerintah wilayah dalam menggali keahlian keuangan wilayah bisa dilihat dari kinerja keuangan wilayah yang diukur memakai analisis rasio keuangan wilayah.

Perwujudan dari transparansi serta akuntabilitas keuangan negeri diwujudkan lewat penataan laporan keuangan. Tujuan pelaporan pemerintah wilayah buat menyajikan data yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan pertanggungjawaban pemerintah wilayah selaku pihak yang bertugas dalam mengelola sumber energi yang dipercayakan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan warga harus mengantarkan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya buat dinilai apakah sukses melaksanakan tugasnya dengan baik ataupun tidak.

Parker(1996) dalam Suradjito(2000) Mengatakan ada 5 khasiat dengan terdapatnya pengukuran kinerja ialah:(1) pengukuran kinerja sanggup tingkatkan kualitas pengambilan keputusan;(2) pengukuran kinerja sanggup tingkatkan akuntabilitas internal;(3) pengukuran kinerja tingkatkan akuntabilitas public;(4) pengukuran kinerja menunjang perencanaan strategi serta penetapan tujuan;(5) pengukuran kinerja membolehkan sesuatu entitas buat memastikan pemakaian sumber energi secara efektif.

Faktor keuangan penting dalam setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Semakin besar jumlah uang yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat dilaksanakan. Demikian juga semakin baik pengelolaannya maka semakin berdayaguna pemakaian uang tersebut.

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam pelayanan publik yang lebih banyak, yaitu bukan sekedar kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan secara efisien dan efektif. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial. Pengembangan potensi wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak dapat dipisahkan sebagai bagian integral di Provinsi Sulawesi Utara.

Pada hakikatnya keuangan daerah yang tertuang dalam APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara merupakan aset milik masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dalam rangka memenuhi prinsip akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negara No 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Wilayah. Dengan syarat ini, diharapkan supaya pengelolaan keuangan wilayah ataupun APBD bisa menggapai tujuan yang diresmikan serta bisa penuhi kebutuhan pihak- pihak terpaut dalam pengambilan keputusan. Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017- 2020 ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Anggaran Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-2020

Keterangan	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020
PENDAPATAN	12.343.658.356,80	11.430.627.124,94	15.035.563.950,71	12.797.558.993,50
1. Pendapatan Pajak Daerah	4.716.365.005,00	4.492.953.023,00	5.107.187.220,46	4.178.550.717,00
2. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	565.464.506,00	886.839.194,00	1.055.651.225,00	596,478,408,00

yang dipisahkan				
3. Lain-lain Pendapatan yang sah	7.061.828.845,80	6.050.834.907,94	8.872.725.505,25	8.619.008.276,5
BELANJA	14.380.873.737,00	12.058.081.225,00	12.859.395.115,00	13.552.742.219,00
1. Belanja Operasi	14.012.129.737,00	11.326.631.250,00	5.884.368.114,00	12.545.495.519,00
2. Belanja Barang dan Jasa	7.510.592.720,00	4.547.803.259,00	6.975.027.001,00	5.240.047.848,00
3. Belanja Modal	368.744.000,00	731.449.975,00	1.007.046.000,0	1.007.246.700,00

Sumber: BPKAD 2017-2019

Berdasarkan pada tabel 1 di atas, diketahui bahwa realisasi anggaran kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-2020 secara umum berfluktuasi, meskipun juga terjadi peningkatan pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp 15.035.563.950,71. Pendapatan daerah kabupaten Bolaang Mongondow Utara didominasi oleh pemasukan yang bersumber dari Lain-lain Pemasukan yang legal, sebaliknya Pemasukan Asli Wilayah(PAD) relatif masih sangat kecil terhadap segala total pemasukan. Berikutnya ditinjau dari aspek belanja wilayah yang terdiri atas belanja pembedahan serta belanja modal, belanja pembedahan mempunyai jatah pengeluaran yang lebih besar bila dibandingkan dengan belanja modal.

Penelitian ini pernah di lakukan oleh peneliti sebelumnya, Intan marlia (2019) temuan risetnya menunjukkan bahwa, rasio kemandirian dirata-rata kemampuan keuangan pemerintah daerah provinsi lampung sangat tinggi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan delegatif, rasio efektifitas pemerintah daerah provinsi lampung cukup efektif, rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi lampung masih kurang efisien, rasio belanja pembangunan kabupateen lampung 55,7% yang berarti bahwa pelayanan public yang dilakukan pemerintah provinsi lampung.

Hony adhiantoko (2013) temuan risetnya menunjukkan bahwa, rasio derajat Desentralisasi fiskal bisa dikatakan sangat kurang. sebab, rata- ratanya sebesar 6,57%, rasio kemandirian keuangan wilayah pola ikatan ini masih terkategori dalam pola jalinan instruktif besarnya rasio ini sebesar 7,17% rasio efektifitas PAD efektifitas kinerja keuangan kabupaten blora sudah efisien. Muhammad zuhri ahmad soleh (2018), temuan risetnya menunjukkan bahwa rasio efektifitas PAD kabupaten kaur berjalan kurang efektif. Rasio aktifitas dari sisi rasio belanja operasi tergolong baik.

Oleh karena itu pada penelitian ini peneliti mereflikasi beberapa penelitian sebelumnya dengan yang dilakukan oleh intan marlia(2019) hony adhiantoko (2013) Muhammad zuhri ahmad soleh (2018). Peneliti melakukan peneltian pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan analisi rasio keuangan yang di gunakan Rasio kemandirian rasio efisiensi rasio efektifitas.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah belum sesuai dengan target yang direncanakan.
2. Potensi-potensi daerah yang bisa menjadi sumber pendapatan daerah belum dikelola dengan baik.
3. Retribusi daerah yang tidak lancar mengakibatkan pendapatan berkurang.
4. Kinerja keuangan pemerintah daerah belum optimal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditinjau dari Rasio Kemandirian Tahun Anggaran 2017-2020?
2. Bagaimana Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditinjau dari Rasio Efisiensi Tahun Anggaran 2017-2020?
3. Bagaimana Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ditinjau dari Rasio Efektivitas Tahun Anggaran 2017-2020?

Maksud Penelitian

Adapun maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan menganalisis Perkembangan Kinerja Keuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2017-2020.

Kajian Pustaka

Lahirnya Undang- Undang(UU) Nomor. 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah Wilayah(Pemda) serta UU Nomor. 33 Tahun 2008 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat serta Wilayah, jadi titik dini dimulainya otonomi wilayah. Otonomi wilayah (otoda) merupakan kewenangan wilayah otonom buat mengendalikan serta mengurus kepentingan warga setempat bagi prakarsa sendiri bersumber pada aspirasi warga cocok peraturan perundang- undangan. Sebaliknya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat serta wilayah ialah pemerataan antardaerah secara sepadan, demokratis, adil, serta transparan dengan mencermati kemampuan, keadaan, serta kebutuhan wilayah sejalan dengan kewajiban serta pembagian kewenangan tersebut, tercantum pengelolaan serta pengawasan keuangannya.

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa “keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kinerja sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan startegis (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dapat capai oleh oragnisasi dalam periode tertentu (Bastian, 2015)

Kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi

yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok.

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. Kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Hendro Sumarjo,2010).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan semua transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut riset yang dilakukan Kinerja Keuangan Pemerintah Wilayah merupakan tingkatan pencapaian dari sesuatu hasil kerja di bidang keuangan wilayah yang meliputi penerimaan serta belanja wilayah serta memakai indicator keuangan yang diresmikan lewat sesuatu kebijakan ataupun syarat perundang- undangan sepanjang satu periode anggaran. Wujud kinerja tersebut berbentuk rasio keuangan yang tercipta dari aspek laporan pertanggungjawaban kepala wilayah berbentuk perhitungan APBD (Agustina, 2013).

Permendagri Nomor. 13 tahun 2006 mengatakan bila“ kinerja yakni keluaran/ hasil dari aktivitas/ program yang hendak ataupun sudah dicapai sehubungan dengan mengkonsumsi anggaran dengan kuantitas serta mutu yang terukur”. Kinerja keuangan pemerintah wilayah yakni tingkatan pencapaian dari sesuatu hasil kerja dibidang keuangan wilayah yang meliputi penerimaan serta belanja wilayah dengan menggunakan penanda keuangan yang diresmikan lewat sesuatu kebijakan ataupun syarat perundang- undangan sepanjang satu periode anggaran. Wujud dari pengukuran kinerja tersebut ialah rasio keuangan yang tercipta dari aspek laporan pertanggungjawaban kepada kepala wilayah berbentuk perhitungan APBD. Kinerja keuangan yakni sesuatu dimensi kinerja yang menggunakan penanda keuangan. Sebab menggunakan penanda keuangan, hingga perlengkapan analisis yang sesuai buat mengukur kinerja keuangan yakni analisis keuangan(Hidayat serta Ghozali, 2013).

Tingkatan kemandirian keuangan wilayah di tunjukan dari besar kecilnya pemasukan asli wilayah di banding dengan pemasukan yang berasal dari sumber yang lain. semacam, dorongan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Bagi Suyana Utama(2008), rasio keuangan pemerintah wilayah membuktikan keahlian pemerintah wilayah dalam membiayai aktivitas pemerintahan, pembangunan serta pelayanan terhadap warga.

Kemandirian keuangan wilayah maupun yang biasa diketahui dengan kemandirian fiskal ialah salah satu aspek yang sangat berarti dari terdapatnya penerapan kebijakan otonomi wilayah. Mardiasmo (2009) memberi tahu jika, ada sebagian manfaat yang didapatkan apabila sesuatu wilayah telah sanggup maupun mandiri dalam Mengenai keuangan, antara lain ialah; 1) sanggup buat menekan kenaikan partisipasi prakarsa serta kreativitas warga dalam pembangunan, dan hendak menekan pemerataan hasil- hasil pembangunan di segala wilayah dengan memakai sumber daya dan kemampuan-kemampuan yang terdapat di wilayah. 2) sanggup buat membetulkan alokasi sumber tenaga produktif lewat perpindahan pengambilan keputusan publik ke tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, serta mempunyai data yang lebih lengkap.

Menurut Mahsun (2016) bahwa kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang di perlukan daerah.

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang di terima. Rasio perbandingan dapat di kategorikan efisien apabila rasio yang di capai kurang dar 1 (satu) atau di bawah 100% semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Halim,2007)

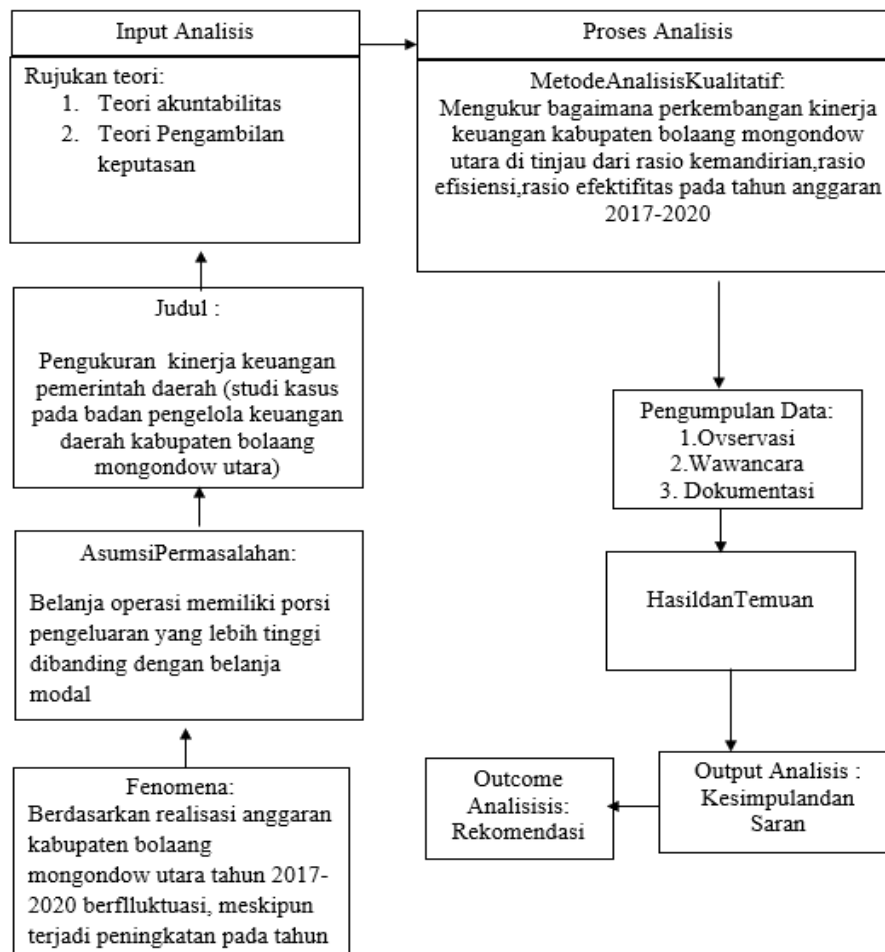
Pengukuran tingkatan efisiensi ini buat mengenali seberapa besar efisiensi dari penerapan suatu efektifitas dengan mengukur input yang digunakan dan menyamakan dengan output yang dihasilkan yang membutuhkan informasi- informasi realisasi belanja serta realisasi pemasukan (Mahmudi, 2011).

Rasio efisiensi ialah tingkatan pencapaian penerapan sesuatu aktivitas ataupun prestasi yang dicapai oleh pemerintah wilayah yang diukur dengan menyamakan realisasi belanja dengan anggaran belanja yang sudah diresmikan, dalam satuan persen. Terus menjadi kecil rasio ini, hingga terus menjadi efektif, begitu pula kebalikannya. Pada zona pelayanan warga merupakan sesuatu aktivitas yang dicoba dengan baik serta pengorbanan seminimal bisa jadi. Sesuatu aktivitas dikatakan sudah dikerjakan secara efektif bila penerapan pekerjaan tersebut sudah menggapai hasil(output) dengan bayaran(input) yang terendah ataupun dengan bayaran minimum diperoleh hasil yang di idamkan(Mahsun, 2016).

Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu pembedahan pada sektor publik sehingga suatu aktivitas dikatakan efektif jika aktivitas tersebut memiliki pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan warga yang ialah sasaran yang telah ditetapkan tadinya. Rasio efektifitas ialah tingkatan pencapaian pelaksanaan sesuatu aktivitas ataupun prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan menyamakan realisasi pemasukan dengan anggaran pemasukan, dalam satuan persen Suyana Utama,(2008).

Rasio efektifitas yang dipaparkan oleh Halim(2007), mejelaskan keahlian pemerintah wilayah dalam merealisasikan Pemasukan Asli Wilayah yang direncanakan dibanding dengan sasaran yang diresmikan bersumber pada kemampuan riil wilayah. Keahlian wilayah dalam melaksanakan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimum 100%. Tetapi, terus menjadi besar rasio daya guna menggambarkan keahlian wilayah terus menjadi baik.

Kerangka Pemikiran



Gambar 1

Kerangka Pemikiran

METODOLOGI

Tata cara riset yang digunakan dalam riset ini merupakan deskriptif dengan memakai pendekatan kualitatif. Posisi yang jadi tempat dalam menggali data dalam riset ini ialah Tubuh Pengelolaan Keuangan Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi (pengamatan).

Dalam penelitian ini peneliti akan memaksimalkan observasi melalui pengamatan serta pemahaman terhadap obyek yang akan diteliti sehubungan dengan hal ini, untuk mempermudah ingatan peneliti, maka akan digunakan beberapa alat bantu berupa catatan kecil serta alat bantu

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu wawancara yang mengajukan pertanyaan narasumber (Moleong,2005). Wawancara dalam penelitian ini nantinya akan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh informan.

2. Dokumentasi.

Dokumentasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data. Dimana sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian ini berupa foto yang bertujuan untuk memberikan informasi bagi proses penelitian. Dokumentasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2017-2020.

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif menggunakan analisis rasio keuangan dilakukan dengan cara meneliti dan membahas data yang telah dikumpulkan berupa laporan keuangan, lalu dihitung besarnya nilai rasio kemudian diinterpretasikan guna mendapatkan suatu gambaran yang jelas serta kesimpulan terhadap masalah yang diteliti. Beberapa rasio yang digunakan dalam menganalisis Laporan Realisasi Anggaran untuk mendapatkan gambaran terkait Kinerja Keuangan dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara diantara :

1. Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

2. Rasio Efisiensi :

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Biaya Pemungutan PAD}} \times 100$$

3. Rasio Efektivitas

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan}}{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Setelah dilakukan perhitungan terhadap masing – masing rasio, kemudian diinterpretasikan berdasarkan kriteria standar umum dari masing – masing nilai rasio, untuk mendapatkan gambaran terkait kinerja keuangan secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Analisis Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam penelitian ini adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan pekerjaan/kegiatan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam bidang keuangan dalam kurun waktu 2017-2020. Rasio yang digunakan oleh peneliti dalam menganalisis kinerja keuangan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD dan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah.

Data yang digunakan bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Asset Daerah (BPKAD). Dari hasil olahan data nantinya dapat memberikan gambaran informasi

mengenai Kinerja Keuangan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama kurun 4 Tahun. Adapun hasil dari Analisis Rasio tersebut adalah :

1. Rasio Kemandirian

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2017} &= \frac{26,321,609,551.80}{653,612,188,941.00} \times 100\% \\ &= 0.040270989 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2018} &= \frac{16,425,467,982.94}{667,364,153,320.00} \times 100\% \\ &= 0.024612452 \\ &= 2.5\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2019} &= \frac{24,174,311,734.71}{633,110,020,750.00} \times 100\% \\ &= 0.038183429 \\ &= 3.8\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Tahun 2020} &= \frac{26,590,701,906.69}{615,424,803,329.00} \times 100\% \\ &= 0.043207069 \\ &= 4.3\% \end{aligned}$$

in Keuangan Daerah pada BPKAD
Tabel 3 di bawah ini :

Tabel 3 Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah BPKAD

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-2020

Tahun Anggaran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Bantuan Pemerintah/Provinsi dan Pinjaman (Rp)	RKKD (%)	Pola Hubungan
2017	26,321,609,551.80	653,612,188,941.00	4.0%	Instruktif
2018	16,425,467,982.94	667,364,153,320.00	2,5%	Instruktif
2019	24,174,311,734.71	633,110,020,750.00	3.8%	Instruktif
2020	26,590,701,906.69	615,424,803,329.00	4.3%	Instruktif

Sumber : LRA BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memperoleh nilai masing-masing rasio dari Tahun 2017 sebesar 4.0%, Tahun 2018 sebesar 2,5%, Tahun 2019 sebesar 3,8% dan Tahun 2020 sebesar 4.3% dengan pola hubungan Instruktif.

2. Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau di bawah 100%. Semakin kecil Rasio Efisiensi Keuangan Daerah berarti Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah semakin baik. Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2017} &= \frac{\text{Rp } 618,764,387}{\text{Rp } 26,321,609,552} \\
 &= 0,0235 \\
 &= 2,25\% \\
 \\
 \text{Tahun 2018} &= \frac{\text{Rp } 715,782,857}{\text{Rp } 16,425,467,983} \\
 &= 0,0430 \frac{457}{735} \\
 &= 4,30\% \\
 &= \frac{239}{100} \\
 &= 2,39\% \\
 \\
 \text{Tahun 2020} &= \frac{401.232.155}{26,590,701,906.69} \\
 &= 0,0151 \\
 &= 1,51\%
 \end{aligned}$$

Ringkasan hasil perhitunga Rasio Efisiensi pada BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada Tabel 4.2 di bawah ini :

**Tabel 4 Perhitungan Rasio Efisiensi pada BPKAD
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-2020**

Tahun Anggaran	Biaya Pemungutan PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
2017	Rp. 618,764,387	26,321,609,551.80	0,0235 = 2,35%	Sangat Efisien
2018	Rp. 715,782,857	16,425,467,982.94	0,0430 = 4,30%	Sangat Efisien
2019	Rp. 579,937,457	24,174,311,734.71	0,0239 = 2,39%	Sangat Efisien
2020	Rp. 401.232.155	26,590,701,906.69	0,0151 = 1,51%	Sangat Efisien

Sumber : LRA BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Berdasarkan hasil perhitungan dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah pada BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memperoleh nilai masing-masing rasio dari Tahun 2017 sebesar 2,35% Tahun 2018 sebesar 4,30% Tahun 2019 sebesar 2,39% dan Tahun 2020 sebesar 1,51% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) tergolong dalam kriteria Sangat Efektif.

3. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi Rasio Efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2017} &= \frac{26,321,609,551.80}{27,616,902,853.92} \times 100\% \\ &= 0.953097807 \\ &= 9,53\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2018} &= \frac{16,425,467,982.94}{16,229,687,927.22} \times 100\% \\ &= 1.012063082 \\ &= 101\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2019} &= \frac{24,174,311,734.71}{21,107,712,880.00} \times 100\% \\ &= 1.145283332 \\ &= 114\%\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Tahun 2020} &= \frac{26,590,701,906.69}{27,736,023,829.11} \times 100\% \\ &= 0.958706341 \\ &= 9,6\%\end{aligned}$$

Ringkasan hasil perhitunga Rasio Efisiensi pada BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada Tabel 4.3 di bawah ini:

**Tabel 5 Perhitungan Rasio Efektivitas pada BPKAD
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-2020**

Tahun Anggaran	Realisasi Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Target Penerimaan PAD (Rp)	Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
2017	26,321,609,551.80	27,616,902,853.92	9.53%	Efektif
2018	16,425,467,982.94	16,229,687,927.22	101%	Sangat Efektif
2019	24,174,311,734.71	21,107,712,880.00	114%	Sangat efektif
2020	26,590,701,906.69	27,736,023,829.11	9.6%	Efektif

Sumber : LRA BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Berdasarkan hasil perhitungan dari Rasio Efektivitas pada BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memperoleh nilai masing-masing rasio dari Tahun 2017 sebesar 9.53%, Tahun 2018 sebesar 101% Tahun 2019 sebesar 114% dan Tahun 2020

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah adalah kemampuan suatu daerah untuk menggali dan mengelola sumber-sumber keuangan asli daerah dalam memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pembangunan daerahnya dengan tidak tergantung sepenuhnya kepada pemerintah pusat dan mempunyai keleluasaan dalam menggunakan dana-dana untuk kepentingan masyarakat daerah dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundangan. Untuk melihat gambaran kinerja keuangan pemerintah daerah yang disajikan dalam laporan keuangan, perlu adanya pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah merupakan bagian dari Pengukuran kinerja keuangan sektor publik yang merupakan sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi memulai alat ukur finansial dan nonfinansial (Mardiasmo, 2018).

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan penghitungan rasio yang didasarkan pada perbandingan antara jumlah PAD dengan total dana transfer yang mencakup bantuan pemerintah pusat, pemerintah provinsi serta pinjaman (Rante, et.al., 2018) Kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan atas pengeluaran maupun belanja akan diindentifikasi melalui besarnya kontribusi PAD terhadap sumber dana dari pihak eksternal pemerintah daerah.

Dari hasil perhitungan terhadap Rasio Kemandirian dengan mengambil data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka ditemukan hasilnya bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah di BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2017-2020 berada di bawah 25% atau dalam kategori rendah. Sehingga menunjukkan pola hubungan yang terbentuk adalah Instruktif. Hal ini terlihat dari pendapatan transfer yang diterima dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat jauh lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah yang terealisasi. Rasio kemandirian paling rendah ada pada tahun 2018 sebesar 2,5%. Hal ini diakibatkan karena Pendapatan Asli Daerah yang diterima mengalami penurunan sebesar 1.5% dari tahun sebelumnya. PAD yang terealisasi hanya sebesar Rp 16,425,467,982.94 sangat jauh dari jumlah Bantuan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta Pinjaman yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yaitu Rp. 653,612,188,941.00.

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian menunjukkan bahwa pendapatan atau bantuan dari pihak ekstern dalam hal ini bantuan dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat terkadang mengalami kenaikan seperti pada tahun 2017 naik dari Rp. 653,612,188,941 menjadi sebesar Rp 667,364,153,320 pada Tahun 2018, kemudian mengalami penurunan pendapatan transfer pada Tahun 2019 menjadi sebesar Rp 633,110,020,750 kondisi ini berlangsung sampai tahun 2020 penerimaan transfer semakin turun menjadi sebesar Rp 615,424,803,329. Untuk peningkatan pendapatan dari pihak ekstern ini meningkat karena adanya peningkatan pada pos-pos dana perimbangan dari pemerintah pusat seperti : Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan DAK (Dana Alokasi Khusus) pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Namun, jika dilihat dari Pendapatan Asli Daerah yang berhasil terealisasi sangat kecil jika dibandingkan dengan bantuan maupun pendapatan dari pihak eksteren maka kemampuan keuangan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya termasuk pola hubungan Instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).

Jadi Kemandirian Keuangan BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sedikit dan belum bisa dapat diandalkan untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, juga dikarenakan adanya perbedaan besarnya pinjaman serta bantuan dari pusat dan total pendapatan pada masing-masing daerah dan realisasi belanja pada masing-masing daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan penerimaan dari potensi pendapatannya yang telah ada. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, misalnya pendirian BUMD yang merupakan sektor potensial.

Banyak penelitian terdahulu yang menampilkan kondisi kemandirian Pemerintah Daerah yang masih dalam pola hubungan Instruktif, seperti penelitian Sri Widada (2012) Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten pada tahun 2006-2010 jika dilihat dari Rasio Kemandirian tergolong rendah sekali atau Instruktif. Rata-rata rasionya sebesar 4,95%. Hal tersebut juga terjadi di Kabupaten Blora pada penelitian ini dimana rata-rata rasionya

sebesar 7,17% dan Kinerja Keuangannya tergolong Instruktif. Menurut Sri Widada penyebab terjadinya kinerja keuangan yang rendah sekali tersebut hamper sama apa yang dijelaskan pada penelitian ini dimana kedua daerah ini masih mengandalkan bantuan dari pemerintah baik pusat maupun provinsi dan belum mampu untuk mengolah potensi yang mereka miliki sendiri guna menaikkan PAD.

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Intan marlia (2019) temuan risetnya menunjukkan bahwa, rasio kemandirian dirata-rata kemampuan keuangan pemerintah daerah provinsi lampung sangat tinggi dan pola hubungannya termasuk pola hubungan delegatif, rasio efektifitas pemerintah daerah provinsi lampung cukup efektif, rasio efisiensi kinerja keuangan pemerintah daerah provinsi lampung masih kurang efisien, rasio belanja pembangunan kabupateen lampung 55,7% yang berarti bahwa pelayanan public yang dilakukan pemerintah provinsi lampung.

2. Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang di keluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang di terima. Rasio perbandingan dapat di kategorikan efisien apabila rasio yang di capai kurang dar 1 (satu) atau di bawah 100% semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja pemerintah daerah semakin baik (Halim,2007).

Sebagaimana Mahmudi (2011) menegaskan bahwa pengukuran tingkatan efisiensi ini buat mengenali seberapa besar efisiensi dari penerapan suatu efektifitas dengan mengukur input yang digunakan dan menyamakan dengan output yang dihasilkan yang membutuhkan informasi- informasi realisasi belanja serta realisasi pemasukan. Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu menghitung secara detail besarnya biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan seluruh pendapatan yang diterimanya, sehingga dapat diketahui cara memungut pendapatannya efisien atau tidak. Hal ini perlu dilakukan, meskipun Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil merealisasikan penerimaan pendapatannya sesuai target yang ditetapkan, namun ternyata biaya untuk memperoleh pendapatan lebih besar dari capaian pendapatannya, maka itu menjadi hal yang sia-sia.

Dari hasil perhitungan terhadap Rasio efisiensi dengan mengambil data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka ditemukan bahwa Rasio efisiensi tahun 2017-2020 berada di bawah 60% atau dalam kategori sangat efisien.

Pada tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.26.321.609.551,80. Dalam aktivitas ini pemerintah telah menggelontorkan biaya pemungutan sebesar Rp.618.764.387. Biaya ini pemungutan PAD ini disajikan sebagai Belanja Langsung dalam Laporan Realisasi Anggaran. Biaya yang dibelanjakan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikategorikan kedalam beberapa akun yang dikategorikan sebagai belanja barang dan jasa yaitu Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah sebesar Rp. 382.804.737, Pemutakhiran Data subjek dan objek pajak PBB sebesar Rp.168.319.050 dan Analisis dan Penyempurnaan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 67.640.600. Sehingga dari hasil analisis rasio efektifitas pada tahun 2017 diperoleh nilai sebesar 2,25% sehingga kinerja pemerintah dikategorikan sangat efisien dalam mengelola sumber daya yang ada.

Pada tahun 2018 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 16425467982.94. Jumlah ini lebih kecil dari tahun sebelumnya. PAD yang dapat direalisasi mengalami penurunan namun biaya pemungutannya justru mengalami peningkatan. Dalam aktivitas ini Pemerintah Daerah telah membelanjakan dana pemungutan PAD sebesar Rp.715.782.857. Peningkatan biaya pemungutan PAD ini disebabkan karena dana yang digunakan untuk aktivitas Pemutakhiran Data subjek dan objek pajak PBB meningkat menjadi sebesar

Rp.203.940.100. Selain itu ada penambahan biaya berupa Peningkatan Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp.51.745.400 dan biaya Optimalisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.84.100.000. Meskipun terjadi penurunan PAD yang terealisasi serta meningkatnya biaya pemungutan PAD, kinerja pemerintah daerah masih dalam kategori sangat efisien yaitu 4,30%.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 24.174.311.734,71. begitupun dengan biaya pemungutan yang digelontorkan oleh pemerintah daerah lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.579.937.457. Peningkatan PAD disebabkan oleh meningkatnya Pendapatan Pajak Daerah khususnya pada item pendapatan Lain-lain yang sah seperti Pendapatan Bunga Deposito yang meningkat cukup signifikan sebesar Rp.3.413.120.329. Selain itu, juga terjadi peningkatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendaharawan sebesar Rp.4.091.540.886,83. Sementara untuk biaya pemungutan PAD pada tahun ini hanyalah mengalami penurunan yang disebabkan karena pengeluaran hanya pada biaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah sebesar Rp. 497.846.557, serta biaya Pemutakhiran Data subjek dan objek pajak PBB sebesar Rp.250.795.900, sehingga biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hasil analisis rasio efisiensi menunjukkan kinerja pemerintah daerah masih dalam kategor Sangat Efisien sebesar 2,39%.

Pada tahun 2020 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berhasil merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 26.590.701.906,69. Hal ini menunjukkan peningkatan meskipun tidak signifikan. Dalam aktivitas ini pemerintah telah menggelontorkan biaya pemungutan sebesar Rp.401.232.155. Artinya bahwa biaya ini pemungutan PAD semakin kecil sementara PAD semakin meningkat. Penurunan biaya ini disebabkan tidak adanya lagi biaya Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah serta biaya Pemutakhiran Data subjek dan objek pajak PBB. Biaya pemugutan PAD pada tahun 2020 hanyalah biaya untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp.401.232.155 sehingga dari hasil analisis rasio efektivitas diperoleh nilai sebesar 1,51% sehingga kinerja pemerintah dikategorikan sangat efisien dalam mengelola sumber daya yang ada.

3. Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output. Efektivitas umumnya berkaitan dengan suatu ukuran kemampuan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Ukuran kemampuan yang di maksud dapat bermacam-macam, tergantung daripada sasaran atau tujuan yang ingin di capai atau yang telah di tetapkan. Efektivitas dapat dikatakan sebagai produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik di tinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang di targetkan.

Dari hasil perhitungan terhadap Rasio efisiensi dengan mengambil data yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) BPKAD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan hasil perhitungan rasio dengan membandingkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2017-202. Ditemukan bahwa kinerja keuangan selama 4 (empat) tahun ini berada dalam skala efektif sampai sangat efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dapat dikategorikan sangat baik karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah melebihi dari yang dianggarkan sebelumnya. Nilai rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun Tahun 2018 sebesar 101% dan Tahun 2019 sebesar 114%. Sementara Tahun 2017 memperoleh nilai rasio sebesar 9.53% sedangkan Tahun 2020 berada pada angka 9.6% dengan kategori efektif.

Pada Tahun 2017 Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan target penerimaan PAD sebesar Rp. 27,616,902,853.92. Target ini hampir sama dengan target pada tahun 2020 yaitu sebesar 27,736,023,829.11. sedangkan Realisasi Pendapatan Asli Daerah yang diterima itu berkisar pada 9,5 % dari target yang telah ditentukan yaitu Rp. 26,321,609,551.80. Penentuan target ini dengan memperimbangkan aspek-aspek potensial yang ada di daerah. Sementara ditahun 2018 dan 2019 Rasio efektivitas berada pada kriteria sangat efektif meskipun target dan realisasi PAD mengalami penurunan yaitu Rp. 16,425,467,982.94 begitupun tahun 2019 rasio menjadi 114% dengan total PAD yang diterima adalah Rp. 24,174,311,734.71.

Melalui analisis efektivitas dapat diketahui seberapa besar realisasi pendapatan daerah terhadap target yang seharusnya dicapai pada periode tertentu. Dengan adanya target realisasi pendapatan daerah dimaksudkan agar mendorong kinerja pemerintah daerah dalam mencapai penerimaan daerah yang tinggi. Untuk target pendapatan daerah setiap tahunnya mengalami peningkatan, sedangkan untuk tingkat realisasi atas pendapatan daerah cenderung berfluktuasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara penelitian yang diukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis rasio kemandirian tahun 2017-2020 dapat disimpulkan, bahwa pola hubungan tingkat kemandirian daerah berada pada kriteria instruktif. Kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada kemampuan keuangan yang masih sangat rendah dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat.
2. Berdasarkan hasil analisis rasio efisiensi tahun 2017-2020 dapat disimpulkan, bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkisar antara 4,30%-1,51% sehingga kinerja pemerintah berada pada kategori sangat efisien.
3. Berdasarkan hasil analisis rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah tahun 2017-2020 nampak bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berkisar antara 9,5% sampai 114%. Angka capaian ini mengindikasikan bahwa kinerja pemerintah dapat dikategorikan sangat baik karena penerimaan dari sektor pajak dan retribusi daerah hampir sama dengan anggaran yang telah ditetapkan.

UCAPAN TERIMA KASIH (*optional*)

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Ichsan Gorontalo yang telah memberi dukungan **financial** sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Sajow, C., Morasa, J., & Wokas, H. R. . (2017). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Tomohon Dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal EMBA Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 1214–1224.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v5i2.16122>
- Abdul, H. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi keuangan daerah, Edisi empat*. Jakarta: Salemba Empat.

- Agustina. (2013). Pengaruh Profitabilitas Dan Pengungkapan Corporatesocial Responsibility Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Padang: Universitas Negeri Padang*.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta. Yogyakarta: Erlangga.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. . BP Universitas Diponegoro.: Semarang.:
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi empat. jakarta: Salemba revisi.
- Mahmudi. (2011). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jogjakarta: UPP STIM YKPN: Edisi Ketiga.
- Mahsun, d. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFYogyakarta: Edisi Ketiga.
- Mahsun, M. (2016). *Akutansi Sektor Publik*. Yogyakarta: BPFY, Anggota IKAPI No. 008: Edisi Ketiga.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan*. Edisi Revisi Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maulia, S. (2019). Analisis Rasio Keuangan Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Apbd Tahun 2020 Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Langsa Provinsi Aceh.
- Sumarjo, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara No. 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 200 Nomor 108.
- Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

LAMPIRAN (optional)

Kelengkapan ini diperkenankan bila dalam hasil dan pembahasan tidak dimungkinkan untuk dicantumkan.